

**STRATEGI PENGELOLAAN HARTA WAKAF
DI KECAMATAN MANGGALA
KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SRI DEWI

NIM: 10200113062

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRIDEWI
NIM : 10200113062
Tempat/Tgl/Lahir : Calirung/05 Mei 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ekonomi Islam
Alamat : Perumahan Griya Patri Abdullah D3/02
Judul : Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan
Manggala Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 November 2017

Penyusun,

SRIDEWI

10200113062



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I, Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
 Kampus II, Jl. H. M Yasin Limpo No.36 SamataSungguminasa-GowaTlp. (0411) 424835 Fax 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, *"Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Manggala Kota Makassar"*, yang disusun oleh **SRIDEWI** NIM: **10200113062**, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 M, bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 November 2017 M

10 Rabiul Awal 1439H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

(.....)

Penguji II : Memen Suwandi, S.E., M.Si

(.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd

(.....)

Pembimbing II : Abdul Rahman, S.Pd., M.Si

(.....)

Diketahui Oleh:

/ **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
UIN Alauddin Makassar

/ **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag**
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Saw, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Tamrin dan Ibunda Muliana yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materi, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau.

Untuk saudara (i) ku tercinta Noviah, Selviana, dan Yuliana serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, bimbingan, dan dukungannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Muslimin, S. Ag, M. Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Abdul Wahab, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Syaharuddin, M.SI selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. H. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
7. Drs. Thamrin Logawali, M. H. selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
8. Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag. selaku pembimbing akademik jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M. Pd. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku penguji I yang telah membantu atas segala saran, masukan, dan perhatian dalam perbaikan skripsi ini.
12. Memen Suwandi, SE., M.Si. selaku penguji II yang telah membantu atas segala saran, masukan, dan perhatian dalam perbaikan skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

14. Rekan, saudara, teman seperjuangan angkatan 2013 yang telah banyak membantu dan telah berjuang bersama dari awal hingga akhir, you're Amazing !
15. Sahabat-sahabatku (Inci, Fahmi, Eva, Diyah, Ita, kak Hanik, Ara, Warda dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu) yang selalu memberikan motivasi, terimakasih untuk waktu *dan breakthrough* nya.
16. Semua pihak yang telah membantu, sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas semua kebaikan dan keikhlasannya yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berikhtiar karena hanya kepada Allah SWT yang bisa membalas kebaikan untuk semua.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walau telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, khususnya di bidang Ekonomi Islam dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Amin *Ya Rabbal Alamin*.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Samata, 29 November 2017

Penyusun

SRIDEWI

10200113062

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan masalah.....	5
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	9
1. Pengertian Wakaf	9
2. Dasar Hukum Wakaf	13
B. Rukun dan Syarat - Syarat Wakaf.....	18
C. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	25
1. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam.....	25
2. Strategi Pengeloaan Wakaf Menurut Hukum Positif	27
D. Kerangka Pikir	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31

C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Pemaparan dan Analisis Data.....	43
1. Pemaparan Data.....	43
2. Analisis Data	50
BAB V.....	60
PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
RIWAYAT HIDUP.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Aset Tanah Wakaf di Kecamatan Manggala.....	40
Tabel 4.2 Subjek Penelitian.....	42
Tabel 4.3 Informan	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Pelayanan Tanah Wakaf.....	54



ABSTRAK

Nama : SRIDEWI

Nim :10200113062

Judul : Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar, serta untuk mengetahui strategi pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dimana peneliti berusaha memberikan gambaran yang jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. Adapun sumber data penelitian ini adalah *nazhir* dan PPAIW KUA Kecamatan Manggala. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Problematika pengelolaan wakaf di Kecamatan Manggala adalah *nazhir* yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dimana dapat dilihat dengan masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat disebabkan karena adanya kendala pada *nazhir* dalam pengurusan surat tanah yang tidak ada serta Praktek wakaf produktif sendiri belum dijalankan karena terkendala pada *nazhir* yang tidak mengetahui tentang wakaf produktif. Proses perwakafan yang dilakukan masih bersifat tradisional dimana tanah wakaf hanya digunakan untuk pembangunan sarana ibadah hal ini terbukti dengan hasil yang dicapai dari harta wakaf yang dikelola saat ini belum maksimal, sehingga harta wakaf yang dikelola saat ini belum dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Manggala.

Kata kunci: *Harta Wakaf, Strategi Pengelolaan Harta wakaf.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dengan segala perangkat aturan dan bimbingan, baik dalam rangka membina hubungan dengan Allah Swt sebagai pemelihara sekalian alam, maupun antara sesama hambanya, atau hubungan hambanya dengan alam lingkungan.

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satu diantaranya yaitu intitusi wakaf. Wakaf merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti penetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.¹ Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar dan lain-lain.² Hal ini disebabkan karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Wakaf pertama kali dilakukan pada masa Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau dengan mendirikan masjid Quba di Madinah. Wakaf yang kedua adalah masjid Dar al-Hijra di Madinah, yang dibangun Rasulullah SAW dan dilaporkan juga bahwa itu adalah wakaf pertama dilakukan setelah mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang *Mukhairaiq* yakni orang Yahudi yang

¹Rozalina, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), h. 1.

²Direktorat Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf*, 2003, h. 15-18.

terbunuh pada perang Uhud dan berpihak pada Muslim. Peristiwa perbuatan hukum wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar ibn Khattab serta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Usman, Ali, dan yang lainnya.

Selama periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di Baitul Mal, namun dikelola oleh *Qadi* yang selalu dimonitoring. Kemudian pada periode tersebut dibentuk Baitul Mal Khusus. Selanjutnya pada periode Mamluk harta wakaf dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Pertama, *Abbas* yang terdiri dari tanah-tanah perkebunan yang luas di Mesir yang digunakan untuk biaya pemeliharaan masjid; Kedua, *Awqaf Hukmiya* yang terdiri dari tanah-tanah perkotaan di Mesir dan Kahira yang terutama diperuntukkan bagi kepentingan kota-kota tersebut; Ketiga, *Awqaf Ahliyah* yang merupakan pemberian keluarga. Setiap jenis wakaf tersebut diadministrasikan secara terpisah.³

Wakaf mulai dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Wakaf merupakan salah satu sumber harta kekayaan bagi umat Islam, di Indonesia aset wakaf terbilang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data dari Direktorat Urusan Agama Islam, pada tahun 1999, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia tercatat 1.477.111.015 m² yang terdiri dari 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jumlah tanah wakaf tercatat 1.538.198.586 m² yang terdiri dari 362.471 lokasi.⁴ Pada tahun 2007, jumlah tanah wakaf meningkat menjadi 2.688.659.047 m² yang tersebar di 366.973 lokasi, kemudian pada data terakhir tanah wakaf di Indonesia tahun 2016 tercatat

³Ibrahim Siregar, “*Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia*”, STAIN Padang sidimpuan Sumatra Utara 8, no. 2 (Oktober 2012): h 275-276

⁴Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 2.

4.359.443.170 m² yang tersebar di 435.768 lokasi di seluruh Indonesia.⁵ Dari data yang terlihat di atas menggambarkan bahwa wakaf dari tahun ke tahun cukup pesat perkembangannya dan memiliki potensi yang besar untuk mensejahterakan umat.

Berdasarkan potensi yang ada, pemerintah cukup serius dalam mengakomodir pengelolaan harta wakaf, hal tersebut diwujudkan lewat peraturan perundang-undangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fikih yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, dengan adanya peraturan tersebut umat islam tinggal menjalankan saja dan tidak perlu lagi banyak berwacana, kalau dulu banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan di Indonesia, maka kini hadir sebuah lembaga atau badan pengelola yang menangani tentang wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai perwujudan terselenggarakannya wakaf dengan baik di Indonesia, setelah lembaga tersebut muncul kini yang harus dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan lembaga independen amanat Undang- Undang tersebut.⁶

Kecamatan Manggala mulai mengelola tanah wakaf dari tahun 1992 sampai sekarang, dengan luas tanah 7391.23 m² yang sebagian besar tanah wakaf tersebut digunakan untuk pembangun tempat ibadah berupa masjid dan musholah.⁷ Perwakafan di Kecamatan Manggala dikelola sepenuhnya oleh *nazhir* baik perseorangan maupun lembaga, dan disahkan pengurusannya oleh KUA Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga data tentang wakaf di

⁵[Http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaftanah](http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaftanah). (diakses pada kamis 3 Agustus 2017 pukul 11.55 WIB).

⁶Peraturan Perundangan, Bab VI, pasal 7, UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006.

⁷Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Manggala.

Kecamatan Manggala, baik *wakif* dan *nazhir* wakaf, serta pemanfaatan wakaf tercatat dengan baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala.

Secara umum persoalan wakaf di Kecamatan Manggala mengalami persoalan yang hampir sama di berbagai daerah di Indonesia. Disamping kurang populer dikalangan umat, keberadaan wakaf di Kecamatan Manggala hanya di gunakan untuk pembangunan Masjid, Mushollah, sekolah, serta lembaga sosial berupa panti asuhan dan panti jompo. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Manggala yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasikan secara optimal.

Berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, sangat penting untuk dikaji dan dievaluasi secara seimbang untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem pengelolaan perwakafan di Kecamatan Manggala.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang “ Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar:

- a. *Nazhir* dari tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum
- b. *Nazhir* dari tanah wakaf yang memiliki sertifikat namun tidak mengelola wakaf secara produktif.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar ?
2. Bagaimana strategi pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar ?

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang wakaf, khususnya pada aspek pengelolaannya, diantaranya:

Misranto (2013) melakukan penelitian tentang “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga masih bersifat sosial tradisional, sehingga harapannya untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga dapat menambah bidang ekonomi agar dapat lebih berperan dalam perwakafan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan kompetensi

keilmuan khususnya di bidang perwakafan, serta dapat memberikan pengetahuan tentang besarnya manfaat wakaf.

Niryad Muqisthi Suryadi (2017), melakukan penelitian tentang “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. Penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh *wakif*, selama ini pihak KUA Kecamatan Pangkajene tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada *nazhir* yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang ada di Kecamatan Pangkajene ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, *nazhir* melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf.

Didin Najmudin (2011), dengan judul “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor”. Penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengelolaan tanah wakaf di desa Babakan pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional. Tanah wakaf yang ada di desa Babakan mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan, seperti digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid dan juga sekolah, serta untuk pemakaman. Namun kini telah berkembang cara baru, tanah wakaf yang masih kosong, terutama yang peruntukannya untuk kuburan kini digunakan oleh para *nazhir* untuk kegiatan produktif, yakni menanam jenis pohon-

pohon industri seperti pohon sagon. Oleh karena itu kini pengelolaan tanah wakaf mulai bergeser kearah yang bersifat ekonomi dan tidak hanya sebatas ibadah.

Nurul Huda (2009), melakukan penelitian mengenai “Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Di Majelis Wakaf dan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang”. Penelitian ini menyatakan bahwa yang menjadi kendala pengelolaan tanah wakaf pada Majelis Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang yaitu kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap harta wakaf (tanah), beberapa tanah wakaf belum memiliki sertifikat, motivasi *nazhir* yang lemah, adanya pelimpahan tugas dan tanggung jawab, perencanaan yang terkadang kurang tepat, tidak ada anggaran dana dalam pengelolaan tanah wakaf, belum adanya sistem, prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, dan kurangnya kontrol dari pengawas terhadap majelis wakaf dan ZIS di tingkat PMC dan terhadap aset-aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah Kabupaten Malang.

Walaupun banyak penelitian-penelitian yang sudah berbentuk skripsi yang membahas mengenai wakaf akan tetapi permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan penelitian di atas. Penelitian ini berfokus pada **Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar.**

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui strategi pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, untuk dapat memberikan informasi tentang problematika dan strategi dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar.
- b. Secara praktis, untuk dapat dijadikan bahan pelajaran, referensi atau paling tidak tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai strategi pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari akar kata bahasa arab “*wakafa*” yang dapat diartikan dengan “*diam ditempat, berhenti atau menahan*”.⁸ Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqfa* (*fiil madi*) *yaqilu* (*fiil Mudari*) *waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri.⁹

Pengertian ini, jika dikaitkan dengan wakaf dalam istilah ilmu tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan al Qur'an. Begitupula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu *wuquf*, berarti berdiam diri atau bertahan di arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Namun maksud menghentikan, menahan atau wakaf disini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* disini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab maliki. Mazhab maliki seperti yang terdapat di Afrika Utara dan Barat, pengertian wakaf di sana adalah dengan memakai istilah habis atau *hubs*, berarti menahan.¹⁰

⁸Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.1

⁹Umransyah Alie, *Diktat Tentang Hibah, Wasiat Dan Wakaf*, (Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, 1997), h. 49

¹⁰Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: CIPUTAT PRESS, 2005), h. 6-7.

Wakaf menurut istilah, berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah Swt.¹¹ Dengan akar kata kerja “*waqafa, yaqifu, waqfan*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri, sebagai lawan kata bergerak.¹²

Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh sebagai berikut:

Pertama, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda atas orang yang berwakaf dari hak kepemilikan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.¹³

Kedua, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu menahan benda milik pewakaf (dari penggunaan secara kepemilikan termasuk upah), tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar untuk sesuatu masa tertentu sesuai lafal akad wakaf dan tidak boleh disyariatkan sebagai wakaf lafal (selamanya).¹⁴

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi’i yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, ijarah, dan Syirkah*, (Jakarta: Al-Ma’arif, 1987), h.5.

¹²Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), h.1.

¹³Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17.

¹⁴Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.326.

penguasaan si *wakif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.¹⁵

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.¹⁶

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie Van Den Islam* memberikan batasan yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.¹⁷

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Karenanya harta

¹⁵Kurniati, *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 58

¹⁶Ahmad Quraisi, *Manfaat Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam Di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Skripsi*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2014), h. 14

¹⁷Abdurrahman, *Masalah Perwakafan tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984), h. 6.

¹⁸Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 153

yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada.¹⁹

Dari paparan mengenai pengertian wakaf secara menyeluruh dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup wakaf yaitu:

- a. Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi
- b. Definisi wakaf ini mencakup harta, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak
- c. Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang
- d. Berulang-ulang manfaatnya dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar maupun selamanya
- e. Menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, mencakup juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya
- f. Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan sebagainya, juga mencakup kebaikan khusus yang dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga *wakif*.
- g. Mencakup pengertian wakaf menurut fiqih dan perundang-undangan bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan *wakif*.
- h. Mencakup pentingnya penjagaan harta wakaf.²⁰

¹⁹Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.146.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi landasan disyariatkannya wakaf terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi serta di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau panduan peraturan wakaf dalam hukum positif Indonesia.

a. Al- Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qura'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Diantara ayat-ayat tersebut antara lain yaitu:²¹

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2 : 267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Qs. Al-Baqarah/2: 267)*²²

Kandungana ayat diatas yaitu berupa perintah kepada orang beriman untuk menafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usaha mereka yang baik-baik sebagai

²⁰Mundzir Qohar, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2007). h. 53-54.

²¹Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2010), h. 435.

²²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Qs. Al-Baqarah: 267.

bentuk syukur kepada Allah. Hendaklah kita menafkahkan harta yang kita cintai dan dermawan dalam mengeluarkan harta, baik yang wajib maupun yang sunnah. Adapun hikmah dari menafkahkan harta di jalan Allah Adalah untuk membersihkan harta tersebut dan membersihkan jiwa dari sifat kikir.²³

Allah Swt berfirman dalam Qs. Ali Imran/3 : 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Qs. Ali Imran/3: 92)²⁴

Ayat diatas dalam bahasa arab memiliki arti yang luas dan mencangup segala jenis kebaikan dalam pikiran atau perbuatan, sebagaimana dalam Al-Quran keimanan kepada Allah dan perbuatan atau amalan seperti shalat, jihad dan tepat janji dihitung sebagai substansi *bir* (yang sempurna). Ayat ini menyebut infak di jalan Allah sebagai salah satu dari contoh *bir* dan kebaikan diartikan bila mana manusia menafkahkan sesuatu yang disukainya kepada orang lain.

Dinukilkan bahwa di malam perkawinan Sayyidah Fathimah as, seorang miskin meminta pakaian usang Sayyidah Fatimah, namun beliau menginfakkan pakaian baru perkawinannya kepada wanita miskin tadi. Ini adalah substansi ayat yang menyatakan, infakkanlah dari apa yang engkau suka, bukannya yang diminta

²³<http://Belajar%20Sunnah%20%20Tafsir%20Surat%20%20AlBaqarah.%20Ayat%20267>.

Diakses pada Kamis 9 November 2017 pukul 08.43 WIB.

²⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Qs. Ali Imran: 92.

oleh orang miskin, karena kemungkinan mereka itu menerima hal yang sudah tua dan usang karena tercekik kemiskinan. Bagaimanapun juga, infak memiliki arti yang luas yang meliputi segala bentuk bantuan kepada orang lain, baik berupa sedekah dan pemberian, maupun berupa *qardhul hasanah*, baik berupa wakaf dan nazar.²⁵

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2 : 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Terjemahnya:

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Qs.Al-Baqarah/2: 261)*²⁶

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dengan berinfaq Allah akan melipat gandakan pahala tanpa perhitungan hisab bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya, menambahkan reskinya tanpa seorangpun yang mengetahui batas-batasnya, memberikan rahmat-Nya yang tidak seorangpun yang mengetahui jangkauan ukurannya. Infaq yang dimaksud dalam ayat ini adalah infaq yang mengangkat derajat manusia, dan dapat juga diartikan sebagai wakaf. Jadi barang siapa yang berwakaf dengan niatan dan tujuan yang baik pasti akan dilipat gandakan pahala baginya.

²⁵[Http://aIsyAh aSsYauQi%20%20Tafsir%20Surat%20Ali%20Imran%20Ayat%20ke%2092](http://aIsyAh aSsYauQi%20%20Tafsir%20Surat%20Ali%20Imran%20Ayat%20ke%2092)
Diakses pada Kamis 9 November 2017 pukul 08.23 WIB.

²⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Qs. Al-Baqarah: 261.

b. Hadis

Adapun dalil-dalil tentang wakaf yaitu:

1) Hadis riwayat Ibnu Umar

“Umar mempunyai tanah di khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk mengelolanya, sambil berkata: Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat ?. Rasulullah bersabda: “ jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan sedekahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dilual dan diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia (umar) menshadaqahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu.”²⁷

2) Hadis riwayat Anas

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Abdush Shomad berkata aku mendengar bapakku telah bercerita kepada kami Abu At Tayyah berkata telah bercerita kepadaku Anas bin Malik radhiallahu’anh: ketika Nabi shallallahu’ alaihi wasallam tiba di Madinah, Beliau memerintahkan untuk membangun masjid (Nabawiy) lalu berkata: “wahai Bani Najjar, tentukanlah harganya (jual lah) kepadaku kebun-kebun kalian ini”. Mereka berkata: “demi Allah, kami tidak membutuhkan uangnya akan tetapi kami berikan kepada Allah”(HR Bukhari).²⁸

3) Hadis riwayat Abu Hurairah

“Telah meriwayatkan kepada kami Ar Rabi’ bin Sulaiman Al Muadzdzin, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Al’ Ala bin Abdurahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: ”apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Abu Daud)²⁹

²⁷Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Cet XXVII, Diterjemahkan oleh Al – Hasan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 410.

²⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 15*, Terjemahan Amiruddin, C. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 519.

²⁹Muhammad Nashirudin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, Terjemahan Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, c. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 335.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Sejak dahulu, praktik wakaf telah ada sejak zaman kerajaan Islam dan telah menjadi kekuatan sosial politiknya pada saat itu. Saat ini, salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di Indonesia adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat peraturan yang menjadi landasan hukum positif di Indonesia dalam hukum positif Indonesia dasar hukum wakaf dapat di lihat dari beberapa peraturan di bawah ini:

1. UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Penegasan atas perlindungan tanah milik perwakafan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.
2. PP No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, peraturan ini mengatur inventarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik dan proses pemberian hak atas tanah wakaf.³⁰
3. Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³¹
4. UU No 41 tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.³²
5. PP No 42 tahun 2006 Wakaf adalah seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

³⁰Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat 1.

³¹Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 215.

³²Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 3.

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.³³

B. Rukun dan Syarat - Syarat Wakaf

Kendati para imam mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitupula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.³⁴

Abdul Wahhab Khallaf menetapkan rukun wakaf pada empat kategori, yang mempunyai hubungan signifikan, yaitu:

1. *Wakif*, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum.
2. *Mauquf bin*, harta benda yang akan di wakafkan.
3. *Mauquf 'alaih*, orang berhak menerima harta wakaf.³⁵
4. *Siqhat*, atau ikrar wakaf dari *wakif*

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya *qobul* (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut.³⁶

³³Arief Muzacky Juhanda, *Implementasi Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: 2011), h. 23-25.

³⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 16.

³⁵ Mukhtar Lutfi, *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf Di Kota Makassar*, (Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 49-50.

³⁶Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2006), h.62

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf. Pada pasal 6 tersebut disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.³⁷

Namun unsur-unsur tersebut harus memenuhi beberapa syarat untuk sah atau tidaknya unsur wakaf, yang sekaligus ikut menentukan dapat tidaknya terlaksana perwakafan itu. Adapun syarat – syarat wakaf tersebut yaitu:

a. *Wakif*

Untuk sahnya wakaf, orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan harus cakap bertindak dalam melakukan “*tabarru*” artinya *wakif* harus ikhlas melepaskan miliknya tanpa pamrih atas benda yang diwakafkan itu. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa
4. Tidak di bawah pengampuan (boros/lalai).

Dengan demikian seorang *wakif* apabila telah dipenuhi syarat tersebut sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas harta benda yang akan diwakafkan. Yang menjadi titik berat dalam menentukan apakah seseorang dianggap cakap “*bertabarru*” atau tidak adalah adanya pertimbangan akal yang sempurna pada

³⁷Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 5-6.

orang yang telah mencapai balik. Fikih Islam menentukan bahwa umur 15 tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan, seringkali anak berumur 15 tahun belum mempunyai pertimbangan akal yang sempurna, berhubung karena masih duduk dibangku sekolah menengah pertama misalnya, oleh karenanya, membatasi umur 15 tahun bagi orang yang dipandang telah berkecakapan “*bertabarru*” itu tidak mutlak, masih memungkinkan diadakan penyesuaian dengan keadaan waktu dan tempat. Dalam hal ini dalam pengetahuan fikih Islam ada namanya “*baligh*” dan “*rasyid*” pengertian balik dititik beratkan pada umur dan *rasyid* dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal.³⁸

b. *Nazhir*

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (pasal 1 BAB I Ketentuan Umum). *Nazhir* berkewajiban mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf, berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf.³⁹

Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum (pasal 9 ayat 5) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam,

³⁸Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h. 76.

³⁹Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h. 79.

Dewasa, Sehat Jasmaniah dan Rohaniah, Tidak Berada di Bawah Pengempunan, Bertempat Tinggal di Kecamatan Tempat Letaknya Tanah Yang Diwakafkan.⁴⁰

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (pasal 10 ayat 2).

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (c) hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan: Memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan, badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam. (pasal 10 ayat 3).⁴¹

c. *Shiqhat* Wakaf

Shigat adalah serah terima yang dilakukan oleh *wakif* kepada *nazhir* untuk menyatakan kehendaknya, pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Lisan dan tulisan dapat dipergunakan oleh siapapun sedangkan isyarat hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam kondisi tertentu saja.⁴² Syarat-syarat dalam *shigat* adalah:

⁴⁰ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

⁴¹Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji) h. 8.

⁴²Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 62.

1. Keberlakuan untuk selamanya yaitu *wakif* harus menyerahkan harta wakaf untuk selamanya, tidak dibatasi waktu sebab wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh berwakaf untuk waktu tertentu.⁴³
2. *Ilzam*, saat *wakif* menyatakan ingin mewakafkan hartanya, maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah hak kepemilikan *wakif* dari hartanya, dengan demikian *wakif* tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf seperti syarat *khiyar* yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf, ada pendapat yang mengatakan bahwa wakafnya batal namun adapula pendapat yang mengatakan wakafnya sah namun syaratnya batal.⁴⁴
3. *Shigat* tidak terkait dengan persyaratan *batil*, menurut Hanafiyah ada tiga yaitu: *pertama*, seperti seseorang yang berwakaf dengan maksud mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya, maka wakafnya menjadi batal. *Kedua*, syarat yang merusak kemanfaatan barang yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan syariat seperti seseorang mensyaratkan pemberian hasil wakaf kepada orang-orang yang mendapatkan hak, maka syarat tersebut rusak atau *fasid*. *Ketiga*, syarat yang benar yaitu syarat yang tidak bertentangan

⁴³Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, Terjemahan Abdul Hayyie Al kattani, dkk, C. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 312.

⁴⁴Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 58.

dengan maksud tujuan wakaf dan tidak merusak manfaatnya seperti syarat mensyaratkan hasil pertama wakaf untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban atau mulai menukar barang wakaf sebelum diberikan kepada orang-orang yang berhak.⁴⁵

d. Harta yang diwakafkan (*al-mauquf*)

Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah milikkan, kecuali memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. *pertama*, barang yang diwakafkan itu mestilah barang berharga. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik pada saat itu tidak sah. *Ketiga*, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*wakif*). *Keempat*, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).⁴⁶

Secara umum yang menjadi syarat sasaran wakaf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berorientasi kepada kebajikan, serta cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta.

Wakaf dilihat dari yang berhak menerima atau sasaran terbagi menjadi dua yaitu *pertama*, wakaf ahli atau *zurriy* yaitu wakaf yang diperuntukan untuk orang tertentu seperti anak, cucu, kerabat, jadi wakaf *zurriy* adalah wakaf yang diberikan

⁴⁵Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, h. 58.

⁴⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 438.

kepada kaum kerabat sesuai dengan *ikrar*. *kedua*, wakaf *khairi* yaitu wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan umum⁴⁷

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Semua madzab sepakat bahwa tujuan perwakafan adalah untuk ibadah. Menurut madzab imam hanafi bahwa orang yang mewakafkan disyaratkan harus beragama Islam. Beribadah menurut syariatnya harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan tujuannya mengenai hal-hal yang baik serta berguna, tidak mengenai hal-hal yang dilarang oleh Agama. Menurut madzab imam hanafi bahwa perwakafan bukan orang islam tidak sah dan perwakafan yang dilarang oleh agama seperti tempat perjudian adalah tidak sah pula sebaliknya madzab yang lainnya (madzab syafii, imam malik dan imam ibnu hambal) perwakafan oleh orang bukan Islam yang bertujuan untuk membantu kepentingan umum adalah sah. Oleh karena dengan jalan memberikan sebagian harta bendanya guna kepentingan umum di jalan Allah, karena tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga tujuan itu harus jelas, misalnya wakaf untuk masjid, madrasah dan lain sebagainya. Karena tujuan sudah dianggap jelas, cara melestarikan tujuan dan cara pengelolaannya dilakukan oleh pengurus wakaf supaya pemanfaatannya dapat kekal dan dinikmati untuk kepentingan umum, dalam kategori ibadah pada umumnya.⁴⁸

⁴⁷Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, c. I, (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013), h. 72.

⁴⁸Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h. 77.

C. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan harta benda wakaf adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara dalam fiqih Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci.⁴⁹

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama imam mazhab tidak mencantumkan keharusan pengadministrasian dalam praktek wakaf. Namun seiring dengan berjalannya waktu sering kali terjadi perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf. Maka dalam hal ini selayaknya kita merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 282. Dimana pada ayat tersebut menegaskan keharusan mencatat kegiatan transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya.⁵⁰

Berwakaf merupakan suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan untuk dicatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, yakni seyogyanya dicatat pula, karena makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa diantara pihak yang bersangkutan.⁵¹

⁴⁹Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 37.

⁵⁰Samsudin. Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggang Kecamatan Pinang Kota Tangerang, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Yariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

⁵¹Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, h. 100.

Selain itu ada beberapa kaidah fiqih yang senada dengan pendapat diatas yaitu kaidah: *adh dharuuru yuzaalu*, artinya: kemudharatan harus dihilangkan. Dan kaidah: *dar ul mafaasid wa jalbul mashaalih*, artinya: menolak kemudharatan dan menarik masalah. Dimana dalam hal ini penyelewengan dan persengketaan akibat tidak adanya pengadministrasian adalah mudharat yang harus dihilangkan. Pembaruan Islam yang beranjak dari fiqih mazhab dengan mengutamakan prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan) dan *siyash syar'iyah* (intervensi negara).⁵²

Mustafa Asy Syiba'I menjelaskan tentang penggunaan wakaf *khairi* (wakaf untuk umum) yang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai negara Islam yaitu: masjid, sekolah, perpustakaan umum, rumah sakit, penginapan orang musafir, air minum untuk umum, perbaikan jalan, kuburan, dan lain segainya.⁵³

Langkah-langkah yang dapat di upayakan para *nazhir* dalam pengelolaan wakaf antara lain:

a. Memperbanyak dan menggalakkan wakaf produktif

Upaya ini bertujuan agar harta benda wakaf mampu menghasilkan dana yang banyak bagi peningkatan kesejahteraan umat. Langkah ini bisa ditempuh melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan undang-undang.⁵⁴

b. Memperbanyak dan menggalakkan wakaf tunai

Dikalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan

⁵²M. Atho Mudzar dan Khairuddin Masution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada), h. 208.

⁵³Suparman, Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet.II. (Jakarta: Radar Jaya Offser, 1999), h.36-37.

⁵⁴Suparman Usman. *Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat*, (Serang Banten, 2007), h. 6.

pendidikan, serta baru belakangan ada wakaf yang berbentuk tunai, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁵⁵

Sebagai upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi umat.⁵⁶

- c. Mengoptimalkan potensi harta benda wakaf sesuai dengan kondisi dan fungsinya.

Model pengembangan ini dilakukan jika ada tanah wakaf yang kurang strategis letaknya untuk dibangun perkantoran atau pertokoan, maka bisa dipertimbangkan untuk ditanami tanaman tertentu yang laku di pasaran yang sangat baik prospeknya dalam dunia ekonomi, seperti ditanami pohon jarak yang saat ini sedang digalakkan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.⁵⁷

2. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Positif

Konsep hukum positif di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam bab II disebutkan bahwa *nazhir*, sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dalam pasal 11 disebutkan memiliki tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya

⁵⁵Suparman Usman. *Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat*.h.7.

⁵⁶Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h.15.

⁵⁷Suparman Usman. *Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat*, h.8.

- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁵⁸

Selanjutnya dalam pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah.
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 disebutkan bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Selanjutnya dalam pasal 43 dinyatakan:

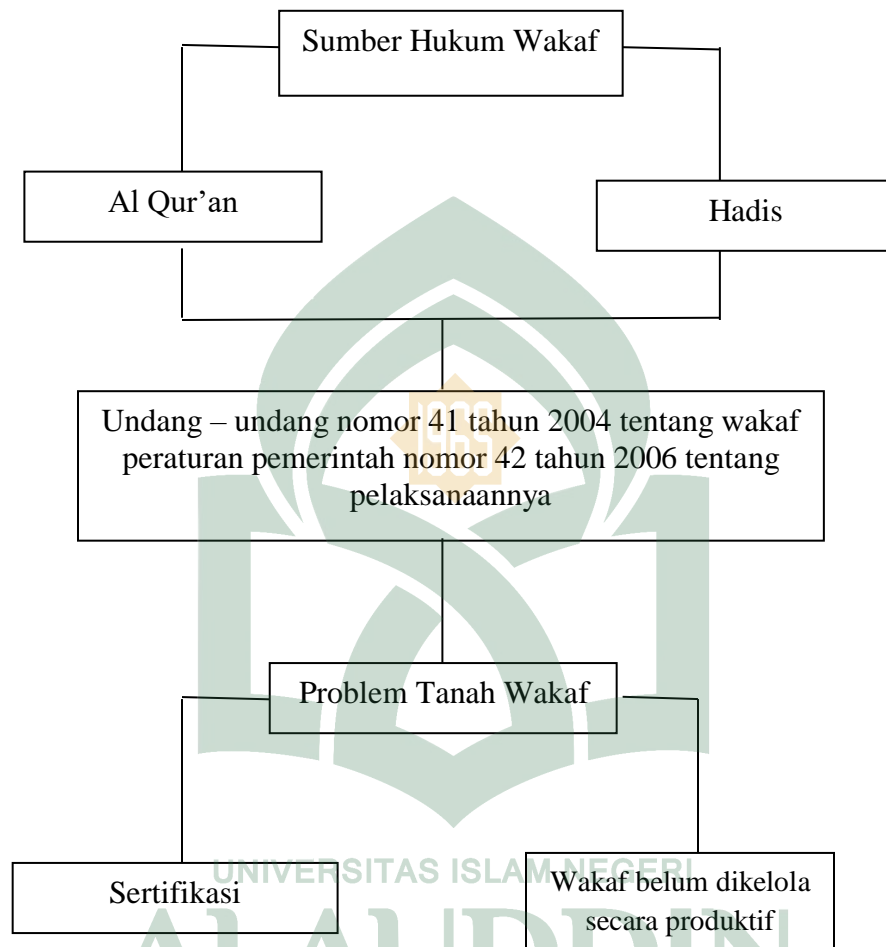
- a) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah
- b) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara produktif
- c) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.⁵⁹

⁵⁸Departemen Agama RI. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h.14.

⁵⁹Departemen Agama RI. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h.22.

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1



Perlunya dilakukan pendaftaran tanah wakaf adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang kedudukan dan status tanah wakaf, agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa terhadap tanah wakaf tersebut karena tanah merupakan harta benda yang rawan akan konflik jadi *nazhir* yang dipercaya untuk mengelola harus dapat bertanggungjawab akan tanah wakaf tersebut dengan salah satu caranya yaitu melakukan pendaftaran tanah wakaf. Namun, fakta di lapangan, berdasarkan

wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Manggala bahwasanya masih terdapat tanah-tanah wakaf yang masih tidak memiliki sertifikat. Perkembangan zaman dan permasalahan ekonomi umat yang semakin memprihatinkan membuat peran wakaf produktif sangat diperlukan untuk diterapkan di Indonesia khususnya di Kecamatan Manggala dalam cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Wakaf produktif dinilai sangat berpotensi untuk membangun ekonomi umat, namun sayang potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat di Kecamatan Manggala. Dimana dalam pengelolaan harta wakaf lebih banyak digunakan untuk pembangunan sarana ibadah saja dalam hal ini pembangunan mesjid dan mushollah serta pembangunan sarana pendidikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian kualitatif atau disebut juga metodologi kualitatif yang berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁰ Atau dapat disebut juga sebagai penelitian yang dalam pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan rumus-rumus statistik.⁶¹ Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Sedangkan waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2017 sampai 5 November 2017.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁶² Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.

⁶⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 3.

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Cet ke-XIII, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), h. 12.

⁶²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 58

C. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data-data penelitian, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:⁶³

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti. Dalam hal ini, data berasal dari pengambilan sampel data pada KUA Kecamatan Manggala baik berupa data tertulis maupun data yang diperoleh dari proses wawancara. Adapun yang termasuk data tertulis yaitu berupa arsip-arsip seperti profil Kecamatan Manggala dan profil KUA Kecamatan Manggala, data aset tanah wakaf, data jumlah *wakif*, data jumlah *Nazhir*, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Serta data yang diambil dari proses wawancara dengan informan yang dianggap memahami tentang tanah wakaf dalam hal ini para *nazhir* dan PPAIW Kecamatan Manggala.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).⁶⁴ Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti al-Qur'an dan Hadits, buku-buku tentang strategi pengelolaan harta wakaf, dan lain-lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

⁶³Suryani Dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 171.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 225.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung atau dengan kata lain antara penulis dan informan saling bertatap mata. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai para informan yang menjadi objek dari penelitian ini, sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, secara garis besar, teknik atau metode pengumpulan data dengan cara wawancara ini di bagi menjadi dua macam, yaitu:⁶⁵

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga pewawancara tinggal membubuhkan tanda (X) pada nomor pernyataan yang sesuai.
- b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara model ini, kreativitas pewawancara sangat di perlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari wawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Mula-mula penulis akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika ditengah perjalanan ada hal yang menarik yang belum tercover dalam pertanyaan itu, maka penulis akan mengubahnya menjadi tidak teratur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan

⁶⁵Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian “*Suatu Pendekatan Praktik*”, h. 270.

yang ada. Model wawancara seperti ini bisa disebut dengan *semi-Terstruktur*, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang paling mengetahui tentang pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Manggala yaitu:

- 1) Bapak Aswar selaku Panitia Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
- 2) Bapak Drs. H Muhammad selaku *Nazhir* Masjid Haji Agus Salim
- 3) Bapak H. Alimuddin selaku *Nazhir* Masjid Nur Taqwa
- 4) Bapak H Haruna selaku *Nazhir* Masjid Nurul Yaqin

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁶ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data dari hasil penelitian yang di dapat dengan berupa gambaran tentang Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang amat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian. Oleh karena itu insrtumen penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi penelitian itu sendiri. Agar dapat

⁶⁶Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 240.

mempermudah dalam pengumpulan data di lapangan. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang digunakan dalam melakukan wawancara dan dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan.
2. Handphone berfungsi untuk memotret dan merekam semua percakapan dengan informan. Dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan keabsahan akan informasi yang diperoleh.⁶⁷

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum peneliti memasuki lokasi penelitian hingga penelitian selesai dilakukan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lokasi, sampai penulisan hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan begitu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data tambahan jika diperlukan.⁶⁸ Dalam

⁶⁷Esterbg. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 112.

⁶⁸Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani, *metode penelitian ekonomi islam (Muamalah)*, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 221

penulisan ini peneliti memfokuskan pada pengelolaan harta wakaf yang berada pada di Kecamatan Manggala.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penulisan kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan, selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari *nazhir* dan KUA Kecamatan Manggala.

3. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah di teliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trigulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat 3 macam triangulasi antara lain triangulasi dengan sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan menggunakan sumber. Triangulasi dengan sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data tentang pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Manggala, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kepada *nazhir*, KUA Kecamatan Manggala yang merupakan sasaran. Data dari sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data. Data analisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Manggala

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kecamatan Manggala merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar. yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Tamalanrea, di sebelah timur Kabupaten Maros, di sebelah selatan Kabupaten Gowa dan di sebelah barat Kecamatan Panakkukang. Kecamatan Manggala ini memiliki 6 kelurahan dengan luas 24,14 km². Kelurahan yang paling luas adalah Tamangapa yaitu 7,62 km², sedangkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil di Kecamatan Manggala adalah Kelurahan Borong yaitu 1,92 km² dan Batua yaitu 1,91km². Jika dilihat dari ketinggian masing-masing kelurahan dari permukaan laut, maka Kelurahan Antang yang paling tinggi yaitu 24 meter diatas permukaan laut sedangkan yang terendah adalah kelurahan Borong dan kelurahan Bangkala yang memiliki ketinggian dari permukaan laut yaitu kurang lebih 7 meter .

Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke Ibukota Kecamatan berkisar 1 km sampai dengan jarak 5-10 km.

b. Pemerintahan

Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Manggala dilaksanakan oleh sejumlah aparat/pegawai yang berasal dari berbagai dinas/instansi pemerintah yang jumlahnya 166 orang terdiri dari 45 laki-laki dan 121 perempuan. Instansi yang menempatkan

pegawainya untuk bertugas di Kantor Kecamatan yakni Badan Pusat Statistik. Jumlah pegawai 1 orang dari Badan Pusat Statistik sebagai Koordinator Statistik Kecamatan.

Tingkat Klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Manggala tahun 2015 terdiri dari 6 kelurahan, 368 RT dan 66 RW dengan kategori kelurahan swasembada.

c. Kondisi Penduduk

Penduduk Kecamatan Manggala terbagi atas enam kelurahan, diantaranya Kelurahan Borong berjumlah 19.033 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 9.420 jiwa dan perempuan 9.613 jiwa. Kelurahan Bangkala berjumlah 29.642 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 14.832 jiwa dan perempuan 14.810 jiwa. Kelurahan Tamangapa berjumlah 12.057 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 6.174 jiwa dan perempuan 5.883 jiwa. Kelurahan Manggala berjumlah 21.079 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 10.535 jiwa dan perempuan 10.544 jiwa. Kelurahan Antang berjumlah 31.936 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 15.906 jiwa dan perempuan 16.030 jiwa. Kelurahan Batua berjumlah 24.912 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 12.674 jiwa dan perempuan 12.238 jiwa.⁶⁹

d. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Manggala Kota Makassar Mayoritas menganut agama Islam⁷⁰ dari data yang diperoleh diantaranya:

1) Kelurahan Borong

Jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Borong yang menganut agama Islam sebanyak 10.929 orang. Masyarakat yang menganut agama Khatolik sebanyak 407 orang. Masyarakat yang menganut Protestan sebanyak 1.267 orang. Masyarakat

⁶⁹Badan Pusat Statistik Kota Makassar *Kecamatan Manggala dalam Angka 2017*.

⁷⁰Badan Pusat Statistik Kota Makassar. *Statistik Daerah Kecamatan Manggala Tahun 2017*.

yang menganut agama Hindu 94 orang. Masyarakat yang menganut agama Budha sebanyak 83 orang.

2) Kelurahan Bangkala

Jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Bangkala yang menganut agama Islam sebanyak 15.640 orang. Masyarakat yang menganut agama Khatolik sebanyak 65 orang. Masyarakat yang menganut Protestan sebanyak 167 orang. Masyarakat yang menganut agama Hindu 3 orang. Masyarakat yang menganut agama Budha sebanyak 14 orang.

3) Kelurahan Tamangapa

Jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Tamangapa yang menganut agama Islam sebanyak 5.262 orang. Masyarakat yang menganut Protestan sebanyak 8 orang. Masyarakat yang menganut agama Hindu 3 orang. Masyarakat yang menganut agama Budha sebanyak 5 orang.

4) Kelurahan Manggala

Jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Manggala yang menganut agama Islam sebanyak 13.081 orang. Masyarakat yang menganut agama Khatolik sebanyak 263 orang. Masyarakat yang menganut Protestan sebanyak 1.375 orang. Masyarakat yang menganut agama Hindu 12 orang. Masyarakat yang menganut agama Budha sebanyak 22 orang.

5) Kelurahan Antang

Jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Antang yang menganut agama Islam sebanyak 11.918 orang. Masyarakat yang menganut agama Khatolik sebanyak 197 orang. Masyarakat yang menganut Protestan sebanyak 283 orang. Masyarakat

yang menganut agama Hindu 63 orang. Masyarakat yang menganut agama Budha sebanyak 81 orang.

6) Kelurahan Batua

Jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Batua yang menganut agama Islam sebanyak 12.866 orang. Masyarakat yang menganut agama Khatolik sebanyak 555 orang. Masyarakat yang menganut Protestan sebanyak 1.457 orang.

2. Sejarah KUA Kecamatan Manggala

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala pertama kali didirikan pada 15 Desember 2002 yang merupakan pemekaran dari kantor cabang Kecamatan Panakukang. Pengelolaan wakaf KUA Kecamatan Manggala sendiri telah berjalan sejak tahun 1992 hingga saat ini.

Dalam pelaksanaan wakaf di KUA Kecamatan Manggala merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak.

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Manggala

Kepala KUA	: H Sambarani, S.Ag.MA
Wakil Kepala KUA	: Abdul Wahab. SHI
Penghulu	: Darul Aqsa Amrah. S. Ag. MA
PPAIW	: Aswar S. Ag
Pegawai	: Hj. Ramsang SHI

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Manggala

a. Visi

“Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam membangun kehidupan beragama di Kecamatan Manggala”

b. Misi

- 1) Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang NR.
- 2) Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah Kec. Manggala
- 3) Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap ZIS.
- 4) Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kondisi Masjid yang kondusif.
- 6) Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis.
- 7) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hisab Rukyat.

5. Tanah Wakaf di Kecamatan Manggala

Perwakafan yang ada di Kecamatan Manggala telah berlangsung sejak lama. Aset tanah wakaf yang ada sekarang berkisar 26 tanah wakaf dan telah diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan dan lain-lain. Berikut daftar tanah wakaf yang ada di Kecamatan Manggala:

Tabel 4.1
Tanah Wakaf Kecamatan Manggala

No	Kelurahan	Luas Tanah (M ²)	Jumlah Lokasi	Sudah Sertifikat	Tahun
1	Borong	465	2	1	2001-2004
2	Bangkala	1232	2	1	1992
3	Tamangapa	5430	6	-	2003-2009
4	Manggala	275	2	1	2005
5	Antang	8186	11	2	2003-2015
6	Batua	1034	3	-	2002-2015

Sumber : KUA Kecamatan Manggala

Jika dilihat dari data yang telah penulis peroleh, dapat dilihat bahwa cukup banyak tanah wakaf yang ada di Kecamatan Manggala dan akan sangat bermanfaat apabila tanah wakaf tersebut dikelola secara profesional. Tanah wakaf yang ada di atas mayoritas adalah tanah wakaf yang sudah ada sejak lama.

B. Pemaparan dan Analisis Data

1. Pemaparan Data

penelitian ini ada 4 subjek yang berprofesi sebagai *nazhir* dan 1 informan yang berprofesi sebagai PPAIW yang diteliti di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Dari data ini peneliti membuat beberapa bagian yaitu diantaranya, nama, umur, pendidikan, serta alamat para subjek yang akan diteliti.

Berikut ini data subjek yang peneliti dapatkan:

Tabel 4.2
Subjek Penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat
1	H Haruna	49 tahun	SD	Pattunuang Daeng Hayo lorong 5
2	H A Mappalawagau	51 tahun	SMA	BTN Antang Raya
3	H Alimuddin	60 tahun	SMP	Antang Raya
4	Drs H Muhammad	53 tahun	S3	Daeng Hayo 26 Antang

Sumber: data di peroleh melalui wawancara

Tabel 4.3

Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan	Alamat
1	Aswar	36 tahun	S1	Manggala Blok 10

Sumber: data di peroleh melalui wawancara

Data ini diperoleh melalui wawancara di lapangan. Peneliti mewawancarai empat subjek dan 1 informan. Empat diantaranya adalah sebagai *nazhir* yang mengabaikan undang-undang perwakafan dalam mengurus tanah wakaf dan satu informan sebagai PPAIW (KUA Kecamatan Manggala). Subjek yang diteliti yang paling muda berumur 36 tahun dan yang paling tua berumur 60 tahun.

Adapun rumusan pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada subjek maupun informan, pertama yaitu tentang problematika dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Manggala. Kedua, strategi pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Manggala.

Penulis pada penelitian ini membagi subjek menjadi dua bagian, yang pertama *nazhir* dari tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum yaitu *nazhir* I dan II. Kedua, *nazhir* dari tanah wakaf yang memiliki sertifikat namun tidak mengelola wakaf secara produktif yaitu *nazhir* III dan IV, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

a. *Nazhir*

1) *Nazhir* I

Tanah wakaf yang diatasnya didirikan sebuah masjid Nurul Yaqin ini terletak di Jalan Bitoa Lama RW.2 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala. Tanah wakaf ini merupakan tanah wakaf dari Hj Mince yang di berikan sekitar akhir 80an. H Hanura mengatakan bahwa tanah wakaf yang didirikan diatas masjid ini belum memiliki sertifikat.

a) Hasil Wawancara

Adakah problem yang dihadapi *nazhir* dalam mengelola harta benda wakaf ?

H Haruna menjawab:

“sampai saat ini belum ada ”

Apakah tanah wakaf ini memiliki sertifikat tanah wakaf?

H Haruna menjawab:

“semetara diurus, ada itu surat-suratnya di KUA”

Apa alasan dari *nazhir* sehingga pengurusan sertifikat tanah belum ada sampai sekarang?

H Haruna menjawab:

“bukannya tidak mau diurus surat-suratnya, sebenarnya kami juga takut ada berita kami dengar banyak masjid yang ditutup, Cuma itu kendalanya kepala KUA di sana pernah bermasalah jadi kepala KUAnyanya diganti jadi suratnya baru lagi diurus ulang. ”

Apakah ada himbauan dari pihak KUA ?

H Haruna menjawab:

“sampai saat ini belum ada himbauan dari KUA tentang pengurusan surat-suratnya”

Berdasarkan wawancara diatas, tidak ada unsur kesengajaan dari *nazhir* untuk tidak mengurus pengadministrasian harta benda wakaf. mereka hanya terkendala karena adanya pergantian kepala KUA yang baru sehingga mereka belum mengadministrasikan tanah wakaf tersebut.⁷¹

2) Nazhir II

Tanah wakaf yang dibangun masjid al-munawarah ini terletak di BTN antang jaya, tanah wakaf ini berasal dari HJ. Nursanti Ilyas dan di berikan kepada H.A Mappalawagau untuk dikelola.

⁷¹H.Hanura (49), selaku *nazhir* Masjid Nurul Yaqin, wawancara, Tanggal 21 Oktober 2017.

a) Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan di kediaman H.A Mappalawagau di BTN Antang Raya, saat wawancara subjek cukup antusias dalam menyambut mahasiswa yang melakukan penelitian.

Adakah problem yang dihadapi nazhir dalam mengelola harta benda wakaf ?

H.A Mappalawagau menjawab:

“kalau masalah dalam pengelolaan tidak ada cuman sampai sekarang surat-suratnya belum lengkap, surat-surat tanahnya tidak ada (hilang). Kami kesulitan mengurus sertifikatnya karena ahli warisnya tidak di tau keberadaannya”

Apakah problem tersebut dibiarkan berlarut – larut atau sudah langkah-langkah untuk diselsaikan?

H.A Mappalawagau menjawab:

“dulu pernah lapor ke KUA tapi sampai sekarang belum ada jalan keluar dari KUA, mereka mengatakan bahwa nazhir harus mengurus surat-suratnya supaya bisa diurus sertifikat tanahnya” namun saya tambah bingung bagaimana caranya mau di urus itu surat tanah kalau tidak ada ahli warisnya”

Berdasarkan wawancara dia ats, *nazhir* kesulitan mengurus tanah wakaf karena surat-surat tanahnya tidaka ada. Hingga saat ini masjid tersebut berdiri diatas tanah wakaf yang belum bersertifikat.⁷²

3) *Nazhir III*

Tanah wakaf yang diatasnya di bangun Masjid Nur Taqwa ini terletak di Jalan Antang Raya, tanah ini adalah wakaf dari H. Nyambang yang diwakafkan sekitar tahun 60an. Tanah ini memiliki akta ikrar wakaf yang terdaftar pada tahun 2007.

⁷² H.A Mappalawagau(51) selaku *nazhir* Masjid Al-Munawarah, wawancara, Tanggal 21 Oktober 2017.

a) Hasil Wawancara

Wawancara ini dilakukan di kediaman H.Alimuddin di Antang Raya. Saat wawancara subjek cukup antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan dan berbicara dengan panjang lebar tentang pengalamannya mengurus Masjid Nur Taqwa. Pada *Nazhir* kali ini peneliti lebih fokus pada wakaf produktif.

Apa bapak mengetahui tentang wakaf produktif ?

H.Alimuddin menjawab:

“bagaimana itu? saya belum pernah mendengar apa itu wakaf produktif”

Untuk pemasukan mesjid Nur Taqwa baisanya diperoleh darimana?

H.Alimuddin menjawab:

“biasanya kami dapat pemasukan dari jama’ah masjid setiap jumat kalau lagi tanggal baru biasanya kadang lebih dari Rp.2.000.000 tapi kalau sudah tanggal tua kurang dari Rp.2.000.000.sebenarnya kami juga lagi menunggu proposalnya dari walikota sudah masuk sekarang kami lagi menunggu dari kesra saya kira tahun baru ini dananya sudah cair.”

Apakah pernah ada himbauan dari KUA terhadap *Nazhir* tentang wakaf produktif?

H.Alimuddin menjawab:

“tidak pernah, waktu saya mengurus sertikat saya bertanya di KUA tentang bagaimana cara pengurusan sertifikat tanah wakaf sementara pengurusan sertifikat ada program Prona jadi pengurusan sertifikatnya gratis tapi tidak disinggung tentang wakaf produktif.”

Berdasarkan wawancara di atas, *Nazhir* sama sekali belum mengetahui tentang wakaf produktif bahkan baru mendengar tentang wakaf produktif pada saat peneliti melakukan wawancara dengan *nazhir* karena memang tidak pernah ada

pemberitahuan dari pemerintah setempat. Selama ini pemasukan masjid Nur Taqwa di peroleh dari sumbangan jama'ah.⁷³

4) *Nazhir IV*

Tanah wakaf yang diatasnya dibangun Masjid Haji Agus Salim ini terletak di Keluran Antang, tanah wakaf ini diberikan oleh H. Agussalim Ahmad. Tanah ini memiliki akta ikrar wakaf yang terdaftar pada tahun 2009.

Nazir yang diberikan amanah untuk mengelola tanah wakaf yang diatasnya dibangun mesjid ini adalah:

a) Hasil Wawancara

Wawancara ini dilakukan dikediaman Drs. H Muhammad jalan Daeng Hayo 26 Antang.

Apakah bapak mengetahui tentang wakaf produktif?

Drs. H Muhammad menjawab:

“saya belum pernah dengan tentan wakaf produktif”

Untuk pemasukan Masjid H agus salim biasanya diperoleh darimana?

Drs. H Muhammad menjawab:

“untuk pemasukan mesjid biasanya kami dapat dari sumbangan masyarakat, ad juga dari Instansi, Kesra, Camat dan Walikota kalau dari camat sama Kesra waktu jelang pemilihan walikota juga ada pemasukan masjid.”

Apakah pernah ada himbauan dari KUA terhadap *nazhir* tentang wakaf produktif?

Drs. H Muhammad menjawab:

“selama ini belum ada himbau dari KUA tentang wakaf produktif.”

⁷³H.Alimuddin(60) selaku *nazhir* Masjid Nur Taqwa, wawancara, Tanggal 21 Oktober 2017.

kasus untuk tanah wakaf ini tidak jauh berbeda dengan kasus *nazhir* sebelumnya diman mereka sama sekali tidak tahu tentang wakaf produktif.

Tanah wakaf yang di kelola oleh *nazhir* III dan IV merupakan tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat tanah wakaf namun belum dikelola secara produktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi *nazhir* dalam penerapan wakaf produktif yaitu karena mereka sama sekali tidak mengetahui tentang wakaf produktif itu sendiri sehingga dalam penerapannya sulit untuk dilakukan.⁷⁴

b. Informan

1) PPAIW (KUA Kecamatan Manggala)

Informan merupakan orang yang berkecimpung dalam pengurusan tanah wakaf yaitu pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini KUA Kecamatan Manggala.

a) Hasil Wawancara

Wawancara ini dilakukan di kantor KUA Kecamatan Manggala. Saat melakukan wawancara informann cukup antusias dalam menyambut mahasiswa yang melakukan penelitian.

Dalam proses sertifikasi apakah ada kendala dari KUA supaya tanah wakaf di Kecamatan Manggala teradministrasi oleh *nazhir* ?

Aswar Menjawab:

“kendala yang kami hadapi itu *nazhir* kurang memperhatikan prosedur perwakafan di mana mereka hanya terfokus pada bangunan fisik, kalau misalnya mesjidnya sudah berdiri mereka sudah menganggap proses perwakafan sudah mereka jalankan dan tidak mengurus proses administasinya padahal sudah ada undang-undang tentang prosedur perwakafan salah satunya itu administrasi.

⁷⁴Drs. H. Muhammad (53) selaku *nazhir* Masjid Haji Agus Salim, wawancara, Tanggal 21 Oktober 2017.

Apa langkah yang yang ditempuh KUA untuk proses sertifikasi?

Aswar Menjawab:

“Upayah yang kami lakukan yaitu mengadakan pertemuan dengan mengundang *nazhir* yang biasa dilakukan sekali setahun itupun kalau ada dananya baru bisa terselenggara.”

Apakah ada pengawasan yang dilakukan pihak KUA terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhir*?

Aswar Menjawab:

“kalau masalah pengawasan KUA tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf yang dikelola oleh *nazhir* setelah penandatanganan akta ikrar wakaf. pengelolaan wakaf diserahkan semua kepada *nazhir* KUA tidak ikut campur dalam pengelolaan tanah wakaf.”

Kendala yang di hadi KUA yaitu *nazhir* yang kurang memperhatikan sertifikasi tanah wakaf dan hanya fokus pada bangunan fisik saja dan menganggap jika bangunan sudah berdiri maka mereka menganggap sudah melakukan proses perwakafan.⁷⁵

2. Analisis Data

Analisis data penelitian ini terkait dengan rumusan masalah yaitu bagaimana problematika pengelolaan harta benda wakaf dan bagaimana strategi pengelolaan harta benda wakaf.

a. Analisis Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Data yang peneliti kumpulkan di lapangan melalui wawancara dengan dua orang subjek yang berstatus sebagai *nazhir* tanah wakaf yang peruntukannya dibangun masjid untuk tempat ibadah merupakan aset yang tidak memiliki kekuatan

⁷⁵Aswar (35) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Manggala. wawancara, Tanggal 23 Oktober 2017.

hukum dan dasar hukum yang jelas, sehingga memungkinkan bermasalah dikemudian hari. Padahal sudah ada undang-undang yang mengatur dengan jelas tentang perwakafan.

Masih adanya tanah wakaf yang belum tersertifikasi sampai saat ini merupakan dampak dari praktek perwakafan yang dilakukan secara lisan yang menggunakan asas saling percaya di masyarakat yang sampai sekarang masih dilakukan dan mengabaikan prosedur yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya praktek perwakafan jenis ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang ini dimana praktek ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu agar tanah wakaf dapat dilindungi dan memiliki kepastian hukum maka sudah seharusnya dilakukan sertifikasi tanah wakaf.

Adapun dalil pengadministrasian tanah wakaf yaitu:

- 1) Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 11 butir a nadzir mempunyai tugas sebagai berikut:
melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.⁷⁶
- 2) Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 32 menyebutkan:
PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.⁷⁷
- 3) Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 pasal 5 ayat (1):
pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan diaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.⁷⁸
- 4) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 pasal 9 ayat (1):
pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.⁷⁹

⁷⁶Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 butir a.

⁷⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32.

⁷⁸Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1)

⁷⁹Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (1)

Dalil di atas merupakan peraturan yang telah dibuat untuk proses perwakafan, peraturan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan wakaf berjalan secara lancar dan tertib.

Pengurusan sertifikat tanah wakaf sebenarnya tidak begitu sulit bahkan sangat mudah untuk dilakukan hanya saja *nazhir* yang tidak begitu sadar akan pentingnya sertifikat tanah wakaf. Adapun proses sertifikasi tanah wakaf yaitu:

- a) Sebuah keluarga bermusyawarah terlebih dahulu untuk mewakafkan tanah miliknya
- b) Kepala keluarga (selaku *wakif*), bersama *nazhir* (pengurus wakaf) dan saksi datang ke KUA menghadap kepada kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. (PPAIW)
- c) PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan *nazhir*
- d) *Wakif* mengucapkan Ikrar Wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW, selanjutnya membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinanya.
- e) *Nazhir* mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf
- f) Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf
- g) Kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada *nazhir*, selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada Akta Ikrar Wakaf.⁸⁰

Wajib kiranya bagi setiap pengelola wakaf dalam hal ini *nazhir* untuk melaksanakan proses perwakafan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar masa yang akan datang tidak ada konflik kepentingan.

Problem selanjutnya adalah terkait masalah wakaf produktif, hingga saat ini wakaf produktif di Kecamatan Manggala belum pernah dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42 *nazhir* bertugas berbunyi: *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.⁸¹

⁸⁰Wawancara dengan Aswar (36) di KUA Kecamatan Manggala, 21 Oktober 2017.

⁸¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42

Maksud dari Undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 42 di atas dapat diketahui bahwa wakaf juga dapat dimanfaatkan kearah yang produktif, namun hingga saat ini belum dilaksanakan oleh para *nazhir* Kecamatan Manggala. Masyarakat khususnya para nadzir bahkan tidak mengetahui apa itu wakaf produktif, hal ini diketahui saat peneliti melakukan wawancara dengan dua subjek yang berstatus sebagai *nadzir* maupun masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu pihak terkait dalam hal ini KUA sebagai PPAIW memang seharusnya melakukan sosialisasi tentang wakaf produktif kepada para *nazhir* agar tanah wakaf yang berada di Kecamatan Manggala bisa bermanfaat secara ekonomi.

Nazhir diatas memang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang tugas *nazhir*.

Dalam undang-undang No 41 Tahun 2004 pasal 11 yang berbunyi:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta neda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 pasa 13 yang berbunyi:

1. *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 7, dan pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
2. *Nazhir* wajib membuat laporan secara berkala kepada Mentri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap *nazhir*, mereka tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah wakaf yang di kelolanya, meskipun sudah ada upaya namun meraka terkendala pada persuratan yang tidak lengkap serta tidak di

ketahuinya keberadaan ahli waris. Persoalan tersebut menjadi hambatan bagi *nazhir*, seperti yang dialami oleh *nazhir* Masjid Al-Munawarah untuk mengurus sertifikat tanah wakafnya. Berbeda halnya dengan yang dihadapi oleh *nazhir* Masjid Nurul Yaqin, sudah ada upaya yang dilakukan dengan pengurusan sertifikat tanah wakafnya yang menjadi persoalan karena adanya masalah internal pada KUA Kecamatan Manggala sehingga dilakukan pergantian kepala KUA sehingga sampai saat ini *nazhir* belum melakukan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.

Persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, *nazhir* harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah tersebut baik ditempuh dengan cara musyawarah dengan tokoh masyarakat, agama, maupun RT. Musyawarah tersebut dilakukan untuk mencari solusi dan kejelasan terhadap status tanah wakaf yang diakui oleh masyarakat setempat sebagai tanah wakaf. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 62 menyebutkan bahwa:

Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan melakukan musyawarah, dengan melakukan musyawarah diharapkan dapat mengatasi persoalan yang terjadi. dari hasil musyawarah tersebut harus ditelusuri dari mana asal usul tanah wakaf tersebut. Apabila masih belum ada kejelasan, maka mereka dapat membentuk pengurusan yang baru ataupun kepengurusan yang lama yang sudah berjalan sebelumnya untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya dapat memperkuat status tanah wakaf yang kemudian diberikan kepada *nazhir* berdasarkan kesepakatan rapat musyawarah tersebut. Kepastian kepengurusan ini didapat setelah seluruh

masyarakat sepakat akan penunjukan *nazhir* yang baru maupun yang lama. Setelah sepakat akan penunjukan pengelola kemudian akan ditindaklanjuti oleh RT, kemudian melalui keterangan dari RT tentang pengurusnya kemudian dilanjutkan ketingkat kelurahan untuk penerbitan SKT atas nama *nazhir* tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan ikrar wakaf dengan mencantumkan surat hasil rapat musyawarah disertai dengan SKT dan kemudian diterbitkanlah akta ikrar wakaf oleh PPAIW di KUA setempat kemudian diajukan ke BPN.⁸²

Persoalan di atas merupakan problematika yang terjadi di Kecamatan Manggala sudah seharusnya dicari jalan keluar dan tidak dibiarkan begitu saja karena harta wakaf merupakan aset yang harus dijaga dan dipelihara.

Melihat kondisi perkembangan zaman sekarang mengharuskan tanah wakaf memiliki surat-surat yang jelas. Maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat yang jelas sering kali mengundang kerawanan akan terjadinya sengketa di kemudian hari.

Sertifikat tanah wakaf merupakan surat yang sangat penting terhadap status tanah wakaf karena dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa. Sengketa tanah wakaf biasanya timbul karena tidak memiliki kejelasan status tanah wakaf yang berpeluang terjadinya konflik. Hal tersebut hendaknya dihindari dengan langkah menagadministrasikan tanah wakaf tersebut. Problematika pengelolaan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Manggala peneliti menarik kesimpulan bahwa kita tidak bisa selalu menyalahkan *nazhir* selaku pihak pengelola, diperlukan juga peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi keberadaan tanah wakaf

⁸²Wawancara dengan Aswar di KUA Kecamatan Manggala, 23 Oktober 2017.

tersebut dalam hal KUA Kecamatan Manggala sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus berperan lebih aktif dengan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap *nazhir*. dengan turun ke lapangan, mereka dapat langsung memantau para *nazhir* apakah sudah terlaksanannya kewajiban para nadzir. KUA juga diharapkan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi pengurusan sertifikat tanah wakaf kepada *nazhir* agar tanah wakaf yang berada di Kecamatan Manggala memiliki kekuatan hukum.

b. Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Manggala

Berdasarkan Data yang diperoleh dari pihak KUA Kecamatan Manggala dimana pendaftaran harta benda wakaf dari tahun 1992 – 2016 tercatat sebanyak 26 pemberian wakaf tidak bergerak berupa tanah yang sebagian besar di pergunakan untuk saran ibadah berupa pembangunan Masjid, pondok pesantren dan panti asuhan. Selama ini pihak KUA Kecamatan manggala belum pernah mengelola wakaf dalam bentuk harta bergerak.

Menurut Aswar:

Selama ini KUA Kecamatan Manggala belum pernah mengelola wakaf berupa uang, emas dll. Karena masyarakat Kecamatan Manggala masih menganut sistem tradisonal, yakni adanya pemikiran masyarakat mengenai wakaf itu masih dalam kategori ibadah dan wakaf hanya berupa tanah.⁸³

Strategi pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Manggala sepenuhnya diserahkan kepada *Nazhir* sebagai pihak yang diberi wewenang dan amanah untuk mengelola harta benda wakaf dengan baik.

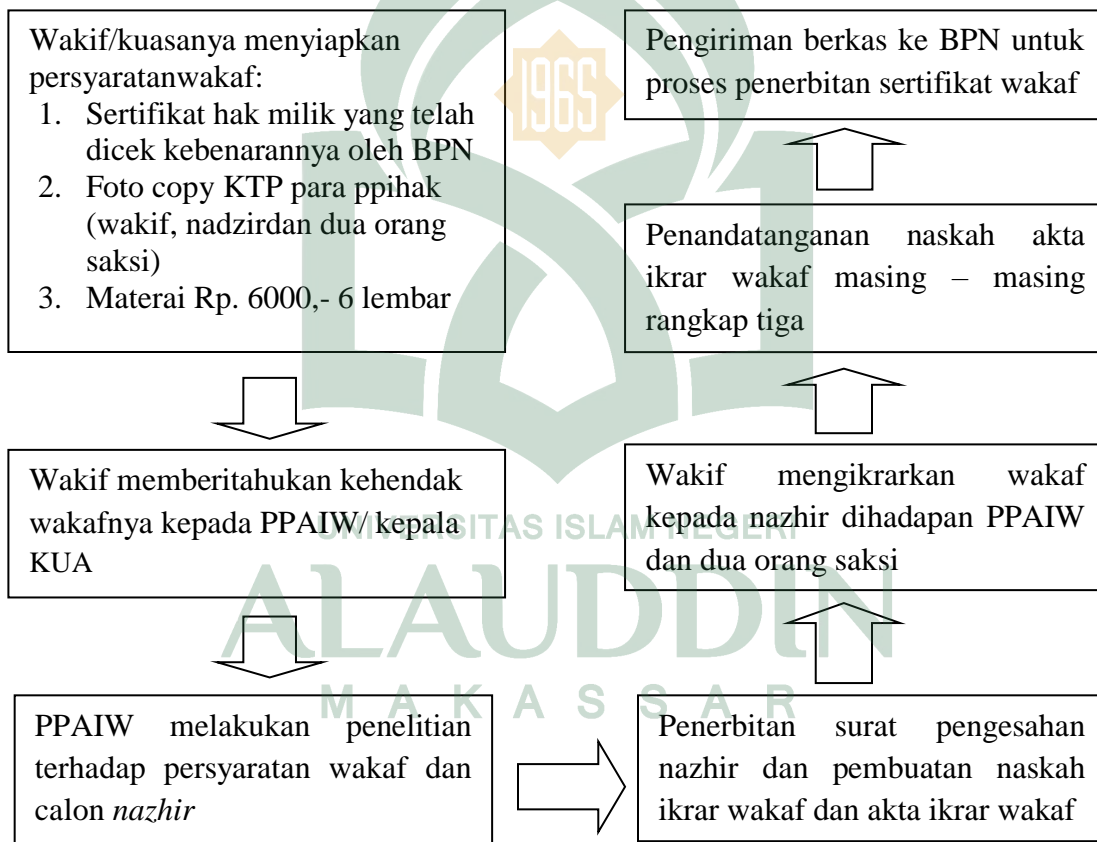
Pihak KUA Kecamatan Manggala tidak ikut campur dalam pengelolaan harta benda wakaf, begitupun dengan penentuan *nazhir* karena *nazhir* ditunjuk langsung

⁸³Aswar (35), selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Wawancara 23 Oktober 2017.

oleh wakif itu sendiri. Pihak KUA hanya sebagai mediator atau tempat untuk melakukan pencatatan administrasi.

Adapun pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan Manggala. Adapun alur pelayanan tanah wakaf yang penulis dapatkan dari kantor KUA Kecamatan Manggala sebagai berikut:

Gambar 4.1
Pelayanan Tanah Wakaf



Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wakaf mengakibatkan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa prosedur dalam mendaftarkan wakaf itu rumit. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang

dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Manggala sehingga wakaf yang ada di Kecamatan Manggala belum optimal.

Adapun strategi pengelolaan wakaf di Kecamatan Manggala yaitu:

1. Meningkatkan pendayagunaan *nazhir* dalam menjadikan wakaf dapat berfungsi secara optimal.
2. Meningkatkan potensi para pengelola wakaf di Kecamatan Manggala dalam hal wakaf produktif.

Adapun kendala tanah wakaf yang dihadapi pihak KUA Kecamatan Manggala sampai saat ini adalah kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pendaftaran wakaf.

Menurut Aswar:

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perwakafan tanah adalah masih adanya masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf. Adapun hambatan dalam pendaftaran tanah wakaf tersebut adalah berkas permohonan yang tidak lengkap (surat tanahnya tidak ada).⁸⁴

Kebiasaan wakaf secara lisan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu hingga sekarang masih saja dijalankan. Tidak tersertifikatnya tanah-tanah wakaf di Kecamatan Manggala merupakan imbas dari praktik yang dilakukan masyarakat yang hanya menggunakan asas saling kepercayaan, dan mengabaikan prosedur yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan. Kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini, wakaf secara lisan sudah tidak relevan untuk dijalankan karena tidak memiliki kepastian dan dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu agar kedudukan tanah wakaf tetap aman, terlindungi dan terpelihara maka sudah sepatutnyalah disertifikatkan.

Tujuan dari diadakannya pendaftaran tanah adalah dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tentang kedudukan dan status tanah wakaf, agar nantinya

⁸⁴Wawancara dengan Aswar di KUA Kecamatan Manggala, 23 Oktober 2017.

tidak terjadi kesalahpahaman karena tanah merupakan harta benda yang rawan akan konflik. Nadzir yang dipercaya untuk mengelola harus dapat bertanggungjawab akan tanah tersebut dengan melakukan pendaftaran. Namun, fakta di lapangan masih terdapat tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

Tuntutan akan perkembangan zaman dan permasalahan ekonomi umat yang semakin memprihatinkan membuat peran wakaf sangat dominan untuk diterapkan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Wakaf dinilai sangat berpotensi untuk membangun ekonomi umat, namun sayang potensi tersebut masih belum dimanfaatkan dan hanya akan menjadi angan-angan saja selama belum memperbaiki pola pemahaman yang selama ini terjadi di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika pengelolaan wakaf di Kecamatan Manggala adalah masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat karena adanya kendala pada *nazhir* dalam pengurusan surat tanah yang tidak ada, hal ini disebabkan karena perwakafan yang dilakukan secara lisan dan tidak diketahuinya keberadaan ahli warisnya. Serta *nazhir* yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada. Praktek wakaf produktif sendiri belum dijalankan karena terkendala pada *nazhir* yang tidak mengetahui tentang wakaf produktif.
2. Proses perwakafan yang dilakukan di Kecamatan Manggala hanya diperuntukkan untuk pembangunan sarana ibadah, sehingga hasil yang dicapai dari harta wakaf yang dikelola saat ini belum maksimal karena belum di kelola secara produktif disebabkan karena pengetahuan *nazhir* yang belum memahami tentang wakaf produktif sehingga harta wakaf yang dikelola belum dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Manggala.

B. Saran

1. Bagi *nazhir* agar kiranya lebih memahami peraturan perundang – undangan tentang wakaf agar dalam melaksanakan tugasnya bisa maksimal

2. Bagi kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang bertugas menangani proses pengadministrasian wakaf agar kiranya lebih aktif dalam pengawasan terhadap *nazhir* apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



RIWAYAT HIDUP



Sri Dewi, lahir di kabupaten Bone 05 Mei 1995. Putri pertama dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan bapak **Tamrin** dan Ibu **Muliana**. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar selama enam tahun di **SD Inpres 4/82 Calinrung** Kabupaten Bone dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2007. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke **SMPN 3 Tellu Siattinge** Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikannya ke **SMAN 1 Tellu Siattinge** Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun inilah penulis meninggalkan tanah kelahirannya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi di kota Makassar pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Al Albani, Muhammad, Nashirudin. *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*. Terjemahan Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, c. II, Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Abdoerraoef. *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- Abdullah, Boedi dan Ahmad Saebani Beni. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1984.
- Alie, Umransyah. *Diktat Tentang Hibah, Wasiat Dan Wakaf*, Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. 1997.
- Al Asqalani, Ibnu, Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Cet XXVII, Diterjemahkan oleh Al – Hasan. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2006.
- . *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 15*. Terjemahan Amiruddin, C. II, Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet ke-XIII, Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2006.
- Atho, Mudzar M dan Masution, Khairuddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada
- Azhar, Basyir, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.
- Az Zuhaili, Wahbah . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, Terjemahan Abdul Hayyie Al kattani, dkk, C. I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. *Kecamatan Manggala dalam Angka 2017*.
 ———. *Statistik Daerah Kecamatan Manggala Tahun 2017*.
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007.
- . *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta. 2007.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf*. 2003.

———. *Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji.

———. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2005.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Qs. Al-Baqarah: 261.

———. Qs. Al-Baqarah: 267.

———. Qs. Ali Imran: 92

Esterbg. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002.

Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press. 2005.

Hendryadi dan Suryani. *Metode Riset Kuantitatif*, Jakarta: Kencana. 2015.

[Http://aIsyAh_aSsYauQi%20%20Tafsir%20Surat%20Ali%20Imran%20Ayat%20ke%2092](http://aIsyAh_aSsYauQi%20%20Tafsir%20Surat%20Ali%20Imran%20Ayat%20ke%2092). Diakses pada Kamis 9 November 2017 pukul 08.23 WIB.

[Http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaftanah](http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaftanah). diakses pada Kamis 3 Agustus 2017 pukul 11.55 WIB.

[Http://Belajar%20Sunnah%20%20Tafsir%20Surat%202%20AlBaqarah,%20Ayat%20267](http://Belajar%20Sunnah%20%20Tafsir%20Surat%202%20AlBaqarah,%20Ayat%20267). Diakses pada Kamis 9 November 2017 pukul 08.43 WIB.

Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 215.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala.

Kartika, Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grafindo. 2006

Kurniati. *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin Press. 2013.

Lutfi Mukhtar. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin Press. 2011.

———. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.

———. *Manajemen Wakaf Upaya Progresif Dan Inovatif Bagi Kesejahteraan Umat*. Makassar: Alauddin Press. 2013

———. *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf Di Kota Makassar*. Makassar: Alauddin Press. 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004.

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Qohar, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa. 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1998.
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet.II. Jakarta: Radar Jaya Offser, 1999.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat 1.
- Peraturan Perundangan, Bab VI, pasal 7, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Manggala

1. Bagaimana sejarah berdirinya perwakafan di KUA kecamatan manggala ?
2. Bagaimana struktur organisasi ?
3. Bagaimana visi dan misi KUA Kecamatan Manggala?
4. Berapa luas tanah wakaf, tahun perolehan dan siapa wakif yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?
5. Apa saja rincian harta benda wakaf yang terdata di kecamatan manggala?
6. Apakah harta benda wakaf yang berada di KUA Kecamatan Manggala sudah tersertifikasi ?
7. Bagaimana proses penghimpunan harta wakaf di KUA Kecamatan Manggala?
8. Bagaimana proses pengelolaan harta wakaf di KUA Kecamatan Manggala ?
9. Apa saja problematika dan strategi yang di tempuh dalam pengelolaan harta wakaf di KUA Kecamatan Manggala?
10. Apa saja problematika dan strategi yang di tempuh dalam pemberdayaan harta wakaf di KUA Kecamatan Manggala?
11. Apa saja bentuk pengawasan harta wakaf yang dilakukan KUA Kecamatan Manggala ?
12. Adakah problematika yang dihadapi *nazhir* dalam mengelola harta benda wakaf ?
13. Dalam bentuk apa problematika yang dihadapi *nazhir* dalam pengelolaan harta benda wakaf?
14. Apakah problem tersebut di biarkan berlarut-larut atau sudah ada langkah-langkah konkrit untuk diselesaikan?
15. Apakah tanah wakaf yang di kelola oleh *nazhir* memiliki surat-surat?
16. Apakah ada himbauan dari pihak KUA untuk pengurusan surat-surat?

17. Apakah anda mengetahui tentang wakaf produktif?
18. Apakah pernah ada sosialisasi oleh KUA/Kemenag tentang wakaf produktif?
19. Untuk pemasukan mesjid biasanya diperoleh darimana?

B. Dokumentasi



Wawancara dengan PPAIW KUA Kecamatan Manggala



Wawancara dengan *nazhir* Masjid Nur Taqwa Kecamatan Manggala



Wawancara dengan *nazhir* Masjid Nurul Yaqin Kecamatan Manggala



Tanah wakaf yang didirikan Masjid Haji Agus Salim



Tanah wakaf yang didirikan Masjid Nurul Yaqin



Tanah wakaf yang didirikan Masjid Al-Munawarah



Tanah wakaf yang didirikan Masjid Nur Taqwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 521/A/EB.I/PP.00.9/2017

Samata, 26 September 2017

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada,

Yth. Kepala UPT P2T BKPM

Prov. Sulawesi Selatan

Di –

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Sri Dewi**
NIM : 10200113062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Griya Patri Abdullah D2/03

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya "**Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar**"

Dengan Dosen pembimbing:
1. **Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd**
2. **Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Kecamatan Manggala Kota Makassar**.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.



Tembusan :

1. *Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata/Gowa*
2. *Mahasiswa yang bersangkutan*
3. *Arsip*



120171914214828

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14660/S.01P/P2T/10/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 5217/EB.I/PP.00.9/2017 tanggal 28 September 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SRI DEWI**
Nomor Pokok : 10200113062
Program Studi : Ekonomi Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" STRATEGI PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Oktober s/d 05 November 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 04 Oktober 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tambusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Perlinggal*

SIMAP PTSP 09-10-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2t.bkpm.d.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, { 0 Oktober 2017

K e p a d a

Nomor : 070 / 9809 -II/BKBP/X/2017
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. CAMAT MANGGALA
KOTA MAKASSAR

Di –

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 14660/S.01P/P2T/10/2017, Tanggal 04 Oktober 2017, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : SRI DEWI
NIM/ Jurusan : 10200113062 / Ekonomi Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63, Makassar
Judul : **"STRATEGI PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Peneitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **09 Oktober s/d 05 November 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Ub. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.A.P

Pangkat : Pembina

NIP. : 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Di Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANGGALA
Jalan Bitowa Raya No.1 Makassar – 90234
Telepon (0411) 490122
Email : sulsel_kuamanggala@kemnag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: Kk.21.12.05/OT.01/.....601...../11/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sambarani, S.Ag. MA
NIP : 19690807 198903 1 005
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar

ini menerangkan bahwa:

Nama : Sri Dewi
NIM/Jurusan : 10200113062/Ekonomi Islam
Instansi/Pekerja : Mahasiswa (S1) UIN
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.63, Makassar

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:

**STRATEGI PENGELOLAHAN HARTA WAKAF
DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR**

Sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2017.

Demikian surat keterangan hasil penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 06 Nopember 2017

Kepala

H. Sambarani, S.Ag. MA
NIP. 19690807 198903 1 005

